



STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2020





<https://ntbpsk.com>

STATISTIK PENDIDIKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2020



STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2020

ISSN : 2797-1147

No. Publikasi : 52000.2116

Katalog BPS : 4301002.52

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 69 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan Oleh:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Penyusun

Pengarah:

Ir. Lalu Supratna

Koordinator Teknis:

Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si

Naskah:

Rika Verlita, SST

M. Ikhsany Rusyda, SST, M.Si

Pengolah Data:

M. Ikhsany Rusyda, SST, M.Si

Desain Tata Letak:

Rika Verlita, SST

Gambar Kulit:

Ayub Abdul Rahman, SST

Penyunting:

Gusti Ketut Indradewi, SST, M.Sc

Amy Wardian Pratama, SST

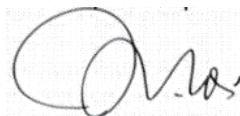
Isna Zuriatina, SST, MT

KATA PENGANTAR

Pendidikan dipercaya sebagai salah satu jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Pembangunan harus dapat menjamin kualitas pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang tangguh, berdaya saing dan mampu meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Capaian pembangunan pendidikan tahun 2020 dapat dipotret dari indikator yang tersaji dalam Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Mataram, Mei 2021

**Kepala Bagian Umum
BPS Provinsi NTB,**



LALU SUPRATNA

<https://ntb.bps.go.id>



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan merupakan hak semua warga negara seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah selalu mengupayakan pembangunan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa melihat umur, gender, kemampuan ekonomi, keterbatasan fisik, dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencanangkan Program Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk di dalamnya Pendidikan Anak Usia dini dan Wajib Belajar.

Pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) di NTB untuk anak usia 3-6 tahun sebesar 42,11 persen. APK PAUD anak perempuan (42,19 persen) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (42,03 persen). Berdasarkan tipe daerah, APK PAUD perkotaan (42,29 persen) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (41,95 persen). Namun capaian ini masih jauh dari target RPJMD Provinsi NTB tahun 2020 sebesar 79,47 persen.

Partisipasi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK cenderung mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD/ sederajat (107,02) sudah melebihi 100 persen. Artinya selain anak usia 7-12 tahun, terdapat anak usia kurang dari 7 tahun dan/atau lebih dari 12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Nilai APK SMP 93,59 dan APK SMA 91,77. Angka partisipasi untuk SMP dan SMA berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Partisipasi sekolah menengah juga berbeda menurut tingkat ekonomi keluarga.

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan. Jumlah sekolah

mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jenjang pendidikan dengan pertumbuhan sekolah tertinggi adalah SMP yaitu sebesar 4,59 persen. Meskipun jumlah sekolah swasta lebih banyak dibanding sekolah negeri pada jenjang SMA dan SMK, jumlah peserta didik pada sekolah negeri masih mendominasi. Terdapat kesenjangan jumlah peserta didik yang cukup besar antara SMK negeri dan swasta yaitu 69,54 persen dan 30,46 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) untuk penduduk 15 tahun ke atas sebesar 87,60 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB 7,31 tahun atau setara kelas 1 SMP. Sebanyak 24,10 persen penduduk 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah dan hanya 9,17 persen yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

<https://ntb.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Sistematika Penyajian.....	5
METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Metode Pengumpulan Data.....	9
2.3. Metode Analisis	9
2.4. Konsep dan Definisi	10
KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT	17
3.1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)	20
3.2. Partisipasi Sekolah.....	24
3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	27
3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	28
3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)	30
3.3. Jumlah Sekolah, Peserta Didik, dan Guru.....	32
3.3.1. Jumlah Sekolah	32
3.3.2. Jumlah Peserta Didik.....	33
3.3.3. Jumlah Guru	35

CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	37
4.1. Angka Melek Huruf (AMH)	39
4.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	43
4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	44
LAMPIRAN	47

<https://ntb.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 . Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2020 RPJMD dan Capaian Tahun 2020 Provinsi NTB	19
Tabel 3.2 . Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, Maret 2020	25
Tabel 3.3 . Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, Maret 2020	27
Tabel 3.4 . Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi NTB, Maret 2020	29
Tabel 3.5 . Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi NTB, Maret 2020.....	31
Tabel 3.6 . Jumlah Sekolah di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020.....	32
Tabel 3.7 . Persentase Peserta Didik di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Status Sekolah, dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2019/2020	34
Tabel 3.8 . Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020	35
Tabel 4.1 . Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi NTB, 2020	40

<https://ntb.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020.....	21
Gambar 3.2	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi NTB, Maret 2020	21
Gambar 3.3	APK Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020	22
Gambar 3.4	APM Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020.....	23
Gambar 3.5	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020.....	24
Gambar 3.6	Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, Maret 2020	26
Gambar 3.7	Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020	33
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, Maret 2020	42
Gambar 4.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (dalam Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, Provinsi NTB, 2015-2020 ...	43
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB, Maret 2020.....	44

<https://ntb.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020.....	49
Tabel 2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	50
Tabel 3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020.....	51
Tabel 4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020.....	52
Tabel 5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	53
Tabel 6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	54
Tabel 7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	55
Tabel 8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	56
Tabel 9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	57
Tabel 10.	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	58
Tabel 11.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	59
Tabel 12.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020	60
Tabel 13.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020	61
Tabel 14.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020	62
Tabel 15.	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020	63
Tabel 16.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020.....	64

Tabel 17.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020	65
Tabel 18.	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020	66
Tabel 19.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah, 2020	67
Tabel 20.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2020	68

<https://ntb.bps.go.id>

PENDAHULUAN

<https://numpus.go.id>

<https://ntb.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Tujuan keempat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di Indonesia, pembangunan pendidikan dipercaya sebagai bagian dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Muara pembangunan pendidikan tercermin dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menunjang kehidupan manusia karena dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (*Wajib Belajar*), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui pengembangan akses terhadap pendidikan anak usia dini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, serta kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing dan kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kualitas hidup dapat lebih baik dari generasi sebelumnya.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah dan Partisipasi pendidikan pra-sekolah (PAUD). Data disajikan menurut jenis kelamin, tipe daerah, dan keadaan ekonomi rumah tangga. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

1.2. Tujuan

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun untuk menggambarkan keadaan dan perkembangan sektor pendidikan di Provinsi NTB. Gambaran yang menyeluruh dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah dan capaian pembangunan pendidikan. Informasi dari indikator-indikator pendidikan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pada program dan kebijakan program lainnya pada sektor pendidikan khususnya di Provinsi NTB. Selain itu, data dan informasi yang ada dapat dijadikan bahan kajian penelitian di Provinsi NTB.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini tersusun dalam empat bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab II membahas tentang sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta konsep dan definisi yang dipakai. Bab III membahas tentang keadaan pendidikan di NTB yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi jumlah sekolah, peserta didik, dan guru. Bab IV memberikan paparan tentang capaian pembangunan pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Lampiran menyajikan tabel tentang indikator pendidikan menurut Kabupaten/Kota.

<https://ntb.bps.go.id>

METODOLOGI

<https://id.pps.go.id>

<https://ntb.bps.go.id>

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan BPS pada Maret 2020. Survei ini mengumpulkan data tentang pendidikan seperti partisipasi sekolah, kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, keterangan umum anggota rumah tangga seperti gender, usia, serta kondisi ekonomi rumah tangga terkait pengeluaran. Selain itu, beberapa data terkait dengan fasilitas pendidikan didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berasal dari Susenas dilakukan dengan melakukan pengolahan *raw data* untuk menghasilkan tabel-tabel yang dibutuhkan, sedangkan data fasilitas pendidikan yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikutip dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka.

2.3. Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis yang dilakukan bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.4. Konsep dan Definisi

Agar terhindar dari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, berikut dijelaskan konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini:

- a) **Tipe Daerah Tempat Tinggal** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Status Ekonomi Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah, Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.

- d) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.
- e) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti: Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).
- f) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud di sini adalah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

g) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

h) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

- i) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

SD sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SD luar biasa, Paket A, dan/atau sekolah dasar pamong.

SMP sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMP luar biasa, dan Paket B.

SMA sederajat meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), SMLB, MAK, dan Paket C.

SMK adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi

Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 Tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2 dan S3.

j) **Partisipasi Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{7-12} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 - 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

$$APM_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 - 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 13 - 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 16 - 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APK SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SLTA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SLTA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

- k) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- l) **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.
- m) **Angka Kesiapan Sekolah (AKS)** adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan pra sekolah, terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.
- n) **Rasio Guru-Murid** adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.

<https://ntb.bps.go.id>



KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT

<https://ntb.scribd.id>

<https://ntb.bps.go.id>

KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran 20 persen dari APBN, utamanya di daerah tertinggal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023 merumuskan sasaran pembangunan pendidikan dengan target capaian tahun 2020 dan pencapaiannya sebagai berikut.

Tabel 3.1 Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2020 RPJMD dan Capaian Tahun 2020 Provinsi NTB

Indikator	Target Tahun 2020 RPJMD	Capaian Tahun 2020	Perbandingan target dan capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
APK PAUD*	79,47	42,11	(-)
APM SD/MI	99,74	98,87	(-)
APK SD/MI/SDLB/Paket A	107,00	107,02	(+)
APM SMP/MTs	98,64	83,92	(-)
APK SMP/MTs/Paket B	110,00	93,59	(-)
APM SMA/MA/SMK	92,42	66,04	(-)
APK SMA/MA/SMK/Paket C	98,63	91,77	(-)

* Anak usia 3-6 tahun

Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Semakin tinggi nilai indikator dapat diartikan bahwa pemerintah berhasil dalam menyelesaikan program pendidikan yang merata. Pada tabel 3.1 terlihat bahwa target RPJMD yang sudah tercapai hanya satu indikator yaitu APK

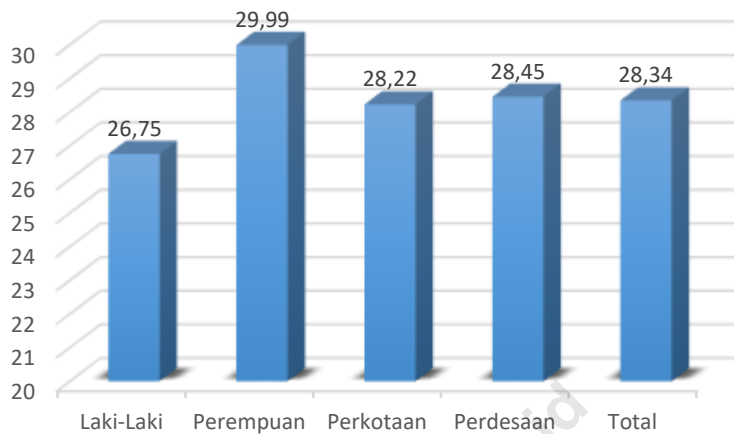
SD/ sederajat. Indikator lain masih berada di bawah target. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun program dan kebijakan program di sektor pendidikan yang lebih efektif. Pada bab ini akan dijabarkan keadaan pendidikan tahun 2020 di Provinsi NTB.

3.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Masa perkembangan anak dimulai dari masa awal kehidupan, sejak di dalam kandungan hingga usia tiga tahun. Usia dini merupakan masa *golden age*. Dalam perkembangan otak manusia, tahap perkembangan anak usia dini menempati posisi paling penting, yakni mencapai 80 persen dari keseluruhan tahapan perkembangan otak. Anak yang mendapatkan layanan pendidikan memadai semenjak usia 0-6 tahun memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang.

Sebagai suatu komitmen dalam memaksimalkan perkembangan anak usia dini di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan antara lain berbentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) (Pemendikbud No 137 Tahun 2014). Pendidikan untuk anak usia dini bisa juga disebut sebagai pendidikan prasekolah.

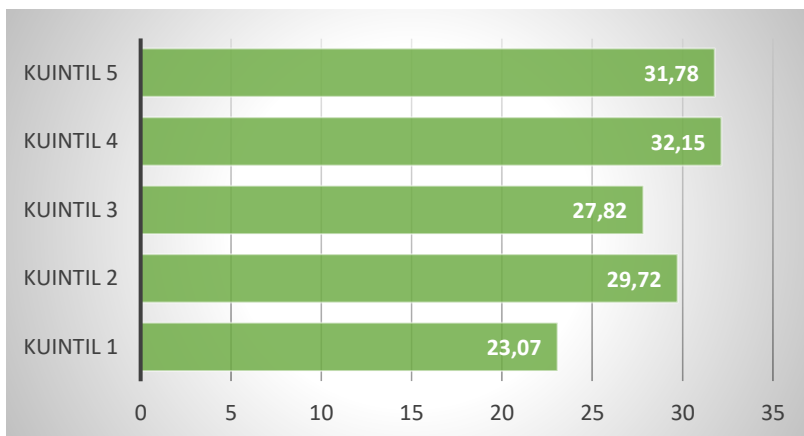
Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Pengolahan data Susenas Maret tahun 2020, menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan anak usia 0-6 tahun di Provinsi NTB mencapai 28,34 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka partisipasi anak perempuan (29,99 persen) lebih tinggi dibanding anak laki-laki (26,75 persen). Angka partisipasi untuk daerah perkotaan sebesar 28,22 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan yaitu 28,45 persen.

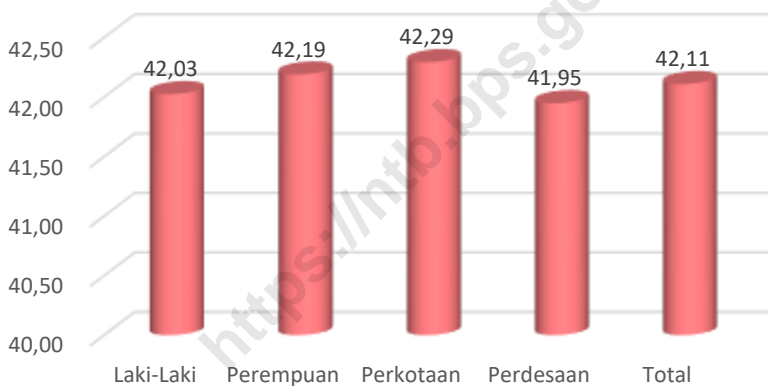
Gambar 3.2 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kelompok Pengeluaran, Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Rumah tangga dapat dikategorikan menurut kelompok pengeluaran yang terbagi dalam lima kelompok, yaitu Kuintil 1, 2, 3, 4, dan 5. Kuintil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terbawah. Semakin tinggi kuintil menggambarkan pengeluaran yang lebih besar, sehingga pengeluaran tertinggi berada di kuintil 5. Partisipasi pendidikan pra-sekolah untuk anak usia dini (0-6) tahun disajikan pada gambar 3.2. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, partisipasi PAUD tertinggi berada pada kuintil ke-4 yaitu sebesar 32,15 persen, diikuti kuintil ke-5 kemudian kuintil ke-2 dan ke-3. Partisipasi PAUD terendah pada kuintil 1, hanya sebesar 23,07 persen.

Gambar 3.3 APK Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020

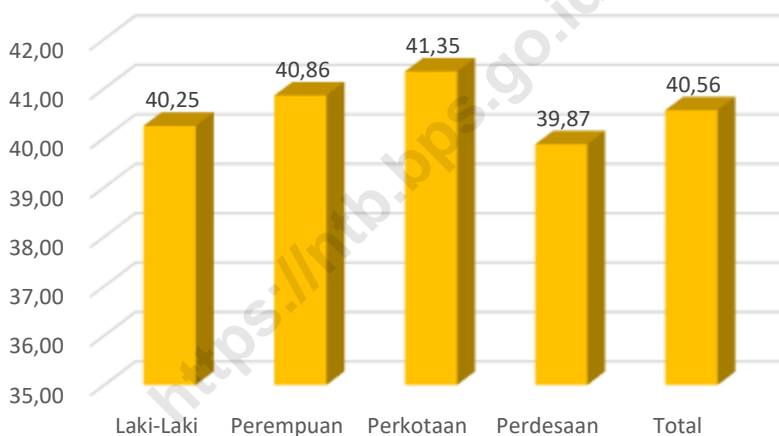


Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Pada gambar 3.3 terlihat bahwa partisipasi PAUD untuk anak usia 3-6 tahun di Provinsi NTB adalah 42,11 persen. APK PAUD daerah perkotaan sebesar 42,29 persen, lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan yaitu 41,95 persen. APK PAUD anak laki-laki sebesar 42,03 persen, sedikit lebih rendah jika dibandingkan anak perempuan 42,19 persen. Anak usia dini belum bisa terlalu dipaksa mengikuti pembelajaran. Belajar sambil bermain lebih ditekankan agar anak tertarik dan bersemangat untuk mengikuti lagi kegiatan PAUD pada keesokan harinya.

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. APM PAUD anak usia 3-6 tahun di Provinsi NTB Maret 2020 mencapai 40,56 persen. Di daerah perkotaan, APM PAUD 41,35 persen sedangkan di perdesaan 39,87 persen. APM PAUD anak laki-laki 40,25 persen sedangkan anak perempuan 40,86 persen.

Gambar 3.4 APM Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2020



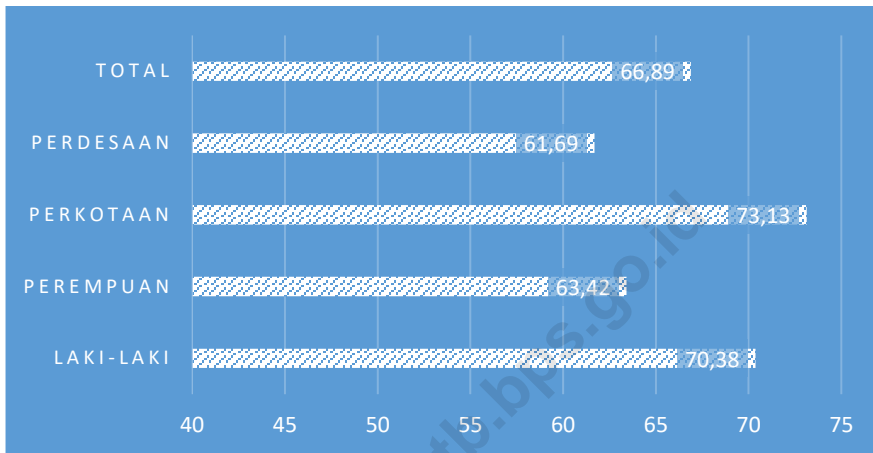
Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Penyelenggaraan PAUD mempunyai tujuan diantaranya menyiapkan anak untuk siap memasuki pendidikan formal (Sekolah Dasar). Indikator yang tepat untuk mengukur kesiapan anak masuk SD adalah Angka kesiapan sekolah (AKS). AKS dihitung dengan membagi jumlah anak yang duduk di bangku kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD di tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah seluruh siswa kelas 1 SD.

Pada tahun 2020, mayoritas anak di Provinsi NTB sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar. Pada gambar 3.5, AKS di Provinsi NTB Maret 2020 sebesar 66,89 persen, artinya 6 diantara 10 anak yang duduk

di kelas 1 SD/ sederajat dinilai sudah memiliki kesiapan sekolah. Angka kesiapan sekolah di daerah perdesaan (61,69 persen) lebih rendah dibanding di perkotaan (73,13 persen). Sedangkan jika dilihat menurut gender, anak laki-laki lebih siap untuk sekolah SD dibandingkan anak perempuan.

Gambar 3.5 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

3.2. Partisipasi Sekolah

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan jumlah fasilitas pendidikan, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Pada tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2020, sebanyak 9,51 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah bersekolah, 27,85 persen sedang bersekolah, dan 62,64 persen sudah tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 10,36 persen menjadi 9,51 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang sedang bersekolah dan tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, Maret 2020

	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Sedang Bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	9,51	27,85	62,64
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,23	29,51	63,26
Perempuan	11,64	26,30	62,07
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	8,41	28,37	63,22
Perdesaan	10,54	27,36	62,10
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	12,78	29,89	57,33
Kuintil 2	11,90	30,49	57,62
Kuintil 3	9,78	28,18	62,04
Kuintil 4	8,29	25,59	66,11
Kuintil 5	5,09	25,31	69,60

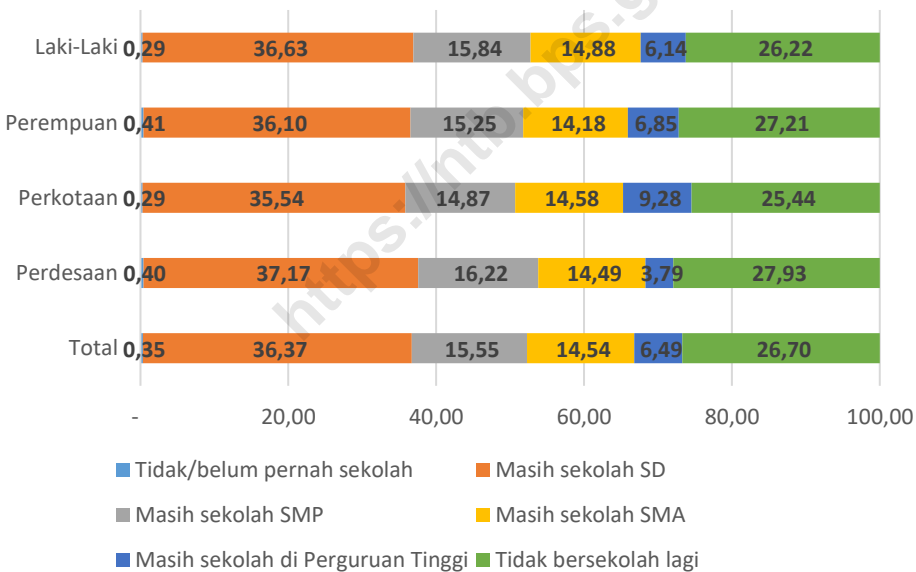
Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk perkotaan yang tidak/belum bersekolah lebih kecil dibandingkan penduduk perdesaan.

Sedangkan persentase penduduk yang sedang bersekolah dan tidak bersekolah lagi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah perdesaan.

Keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pendidikan juga sangat berperan penting dalam memajukan bangsa. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah. Penduduk pada usia tersebut diharapkan masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah, karena generasi muda merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Pada gambar 3.6 terlihat bahwa penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah hampir mendekati 0, yaitu sebesar 0,35 persen. Persentase penduduk 7-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sebanyak 72,95 persen, sementara itu persentase yang tidak bersekolah lagi sebesar 26,70 persen. Tidak ada perbedaan yang

berarti dari sisi jenis kelamin, namun jika dilihat dari daerah tempat tinggal terdapat perbedaan berarti pada persentase penduduk yang masih sekolah di Perguruan Tinggi. Persentase penduduk di perkotaan yang masih sekolah di Perguruan Tinggi hampir 3 kali lipat (9,28 persen) dibandingkan dengan perdesaan (3,79 persen).

3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan menurut kelompok umur sekolah setiap jenjang pendidikan, yaitu SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun).

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, Maret 2020

	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,52	98,32	77,64
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,44	98,08	78,53
Perempuan	99,61	98,57	76,75
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	99,77	98,52	81,60
Perdesaan	99,29	98,15	73,94
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	99,55	97,16	68,84
Kuintil 2	99,26	98,70	79,93
Kuintil 3	99,46	99,66	76,33
Kuintil 4	99,54	97,27	78,50
Kuintil 5	99,93	98,93	82,82

Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,52 persen atau dapat diartikan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Dilihat menurut jenis kelamin, APS perempuan umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun lebih tinggi dari APS laki-laki pada kelompok umur yang sama. Sebaliknya pada kelompok umur 16-18 tahun APS laki-laki lebih tinggi. Menurut tipe daerah tempat tinggal, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar.

APS 7-12 tahun menurut kelompok pengeluaran relatif sama untuk semua kuintil, APS terendah berada pada kuintil 2 sebesar 99,26 persen dan tertinggi 99,93 persen pada kuintil 5. APS 13-15 tahun terendah berada pada kuintil 1 sebesar 97,16 persen dan yang tertinggi berada pada kuintil 5 sebesar 98,93 persen. Begitu juga dengan APS 16-18 tahun, nilai terendah berada pada kuintil 1 sebesar 68,84 persen dan tertinggi berada di kuintil 5 sebesar 82,82 persen.

3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Nilai APK yang lebih dari 100 bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya lebih lambat dari

usianya, serta bisa disebabkan juga karena ada siswa yang tinggal kelas. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga akan semakin rendah.

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa APK SD/ sederajat sebesar 107,02, APK SMP/ sederajat sebesar 93,59, dan APK SMA/ sederajat sebesar 90,86. Nilai APK pada jenjang SD melebihi 100, artinya masih terdapat siswa SD di NTB yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid yang bersekolah SD lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 tahun. APK SMP dan SMA masih di bawah 100, artinya masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di SMP dan SMA pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi NTB, Maret 2020

	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	107,02	93,59	91,77
Jenis Kelamin			
Laki-laki	106,01	95,02	94,70
Perempuan	108,09	92,10	88,82
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	104,52	95,03	93,60
Perdesaan	109,33	92,36	90,06
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	109,15	93,68	92,74
Kuintil 2	107,21	96,07	89,19
Kuintil 3	103,40	94,39	97,13
Kuintil 4	107,60	87,95	90,39
Kuintil 5	107,67	95,87	89,58

Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Pada tingkat SD/ sederajat, nilai APK perempuan lebih tinggi dari APK laki-laki. Sebaliknya pada tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, nilai APK laki-

laki lebih besar dari nilai APK perempuan. Menurut tipe daerah tempat tinggal, APK SD di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Sedangkan pada tingkat SMP dan SMA, nilai APK di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan.

Untuk semua kelompok pengeluaran, APK SD bernilai di atas 100. Nilai APK SD tertinggi ada di kuintil 1 sebesar 109,15 dan terendah ada di kuintil ketiga sebesar 103,40. Nilai APK SMP terendah pada kuintil 4 sebesar 87,95 dan tertinggi di kuintil 2 sebesar 96,07. Pada APK SMA, kelompok masyarakat ekonomi menengah dan tinggi (kuintil ketiga hingga kelima) lebih besar dibanding kelompok ekonomi rendah (kuintil pertama dan kedua). Dilihat dari daerah tempat tinggal, APK SD di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, sebaliknya APK SMP dan SMA jauh lebih tinggi di perkotaan.

3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan penduduk di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Tabel 3.5 memperlihatkan nilai APM jenjang SD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum menyentuh angka 100. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Pada tabel 3.5 terlihat bahwa APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,78 persen, APM SMP/ sederajat 84,98 persen dan APM SMA/ sederajat sebesar 66,81 persen. Pola APM memiliki kemiripan dengan

APK, nilainya semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, APM laki-laki masih lebih besar daripada perempuan untuk setiap jenjang pendidikan, tetapi perbedaannya tidak signifikan.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2020

	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	98,78	84,98	66,81
Jenis Kelamin			
Laki-laki	98,84	85,52	67,59
Perempuan	98,73	84,42	66,03
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	99,07	87,43	70,80
Perdesaan	98,52	82,87	63,10
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	98,46	80,65	56,44
Kuintil 2	98,72	90,88	72,03
Kuintil 3	98,55	85,45	67,36
Kuintil 4	98,94	79,81	67,06
Kuintil 5	99,54	88,45	68,50

Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Dilihat menurut tipe daerah tempat tinggal, APM wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Perbedaan nilai tersebut semakin besar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perbedaan nilai terbesar terlihat pada jenjang SMA/ sederajat yaitu 70,80 persen berbanding dengan 63,10 persen. Sedangkan menurut kelompok pengeluaran, terlihat bahwa pada jenjang SD/ sederajat nilai APM tidak berbeda jauh. Kesenjangan baru terlihat pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Nilai APM SMP/ sederajat terendah ada pada kuintil 1 sebesar 80,65 persen dan nilai tertinggi 90,88

persen pada kuintil 2. Sama halnya dengan SMP/sederajat, APM SMA/sederajat terendah pada kuintil 1 sebesar 56,44 persen dan tertinggi pada kuintil 2 sebesar 72,02 persen.

3.3. Jumlah Sekolah, Peserta Didik, dan Guru

3.3.1. Jumlah Sekolah

Fasilitas pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang dipergunakan dan menunjang proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Fasilitas pendidikan dalam publikasi ini dikhususkan pada jumlah sekolah.

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Persentase Pertumbuhan Sekolah
	2018/2019	2019/2020	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	3 187	3 223	1,13
SMP	916	958	4,59
SMA	322	333	3,42
SMK	311	325	4,50
MI	849	857	0,94
MTs	865	883	2,08
MA	547	559	2,19

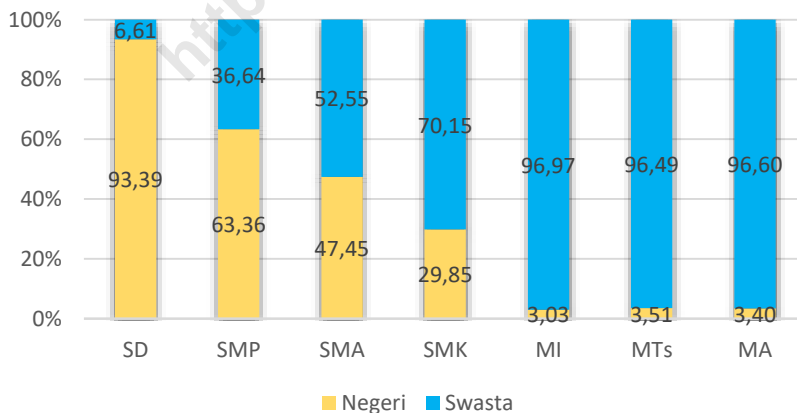
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa jumlah sekolah pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki pertumbuhan jumlah sekolah yang paling tinggi di antara jenjang sekolah lainnya yaitu sebesar 4,59 persen. Kemudian diikuti oleh SMK

di peringkat kedua dengan pertumbuhan sebesar 4,50 persen, SMA sebesar 2,65 persen, dan yang terendah SD sebesar 1,09 persen.

Penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia cukup tinggi. Persentase sekolah negeri terbanyak hanya ada di jenjang SD yaitu sebesar 93,39 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase sekolah swasta juga semakin tinggi. Persentase sekolah swasta pada jenjang SMP/MTs sebesar 36,64 persen, SMA sebesar 52,55 persen, dan SMK sebesar 70,15 persen. Pada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta mendominasi pada semua jenjang. Persentase sekolah swasta pada MI sebesar 96,97 persen, MTs sebesar 96,49 persen, dan MA sebesar 96,60 persen.

Gambar 3.7 Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021

3.3.2. Jumlah Peserta Didik

Sejalan dengan peningkatan jumlah sekolah, jumlah peserta didik juga mengalami peningkatan. Pada tabel 3.7 terlihat bahwa sebagian besar peserta

didik lebih memilih bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta. Hal ini disebabkan karena biaya di sekolah negeri yang lebih rendah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Hal yang cukup menarik terlihat pada distribusi peserta didik di jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Meskipun jumlah sekolah swasta pada ketiga jenjang tersebut lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, namun jumlah peserta didik menunjukkan sebaliknya. Persentase peserta didik pada SMP/MTs swasta mencapai 45,80 persen, SMA/MA sebesar 44,51 persen, dan SMK sebesar 30,46 persen. Hal ini menandakan bahwa sekolah swasta masih belum mampu mengimbangi daya tampung sekolah negeri.

Tabel 3.7 Persentase Peserta Didik di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Status Sekolah, dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Status Sekolah		Jenis Kelamin	
	Negeri	Swasta	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	80,76	19,24	52.22	47.78
SMP/MTs	54,20	45,80	51.06	48.94
SMA/MA	55,49	44,51	46.65	53.35
SMK	69,54	30,46	60.49	39.51

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021

Salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) keempat dan kelima adalah pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Sejalan dengan hal tersebut, kesetaraan dalam pendidikan salah satunya adalah menjamin laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa masih ada sedikit perbedaan antara persentase peserta didik laki-laki dan perempuan. Pada jenjang pendidikan dasar, baik SD/MI maupun SMP/MTs, persentase peserta didik laki-laki lebih besar dibanding perempuan.

Pada jenjang SMA/MA dan SMK, terdapat perbedaan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Peserta didik perempuan cenderung melanjutkan ke jenjang SMA/MA daripada SMK dengan persentase sebesar 53,35 persen. Sedangkan pada jenjang SMK, persentase peserta didik laki-laki lebih besar yaitu 60,49 persen. Hal ini terjadi karena jika dilihat dari kurikulum SMK, 50 persen lebih kompetensi keahliannya lebih banyak peminat laki-laki daripada perempuan.

3.3.3. Jumlah Guru

Guru menurut UU no. 14 Tahun 2005 adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai peran penting dan kedudukan strategis dalam bidang pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar ditentukan oleh keberadaan guru. Ketimpangan distribusi maupun kualitas guru akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Jumlah guru di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran 2018/2019 tercatat bahwa jumlah guru di Provinsi NTB sebesar 102 ribu orang. Terjadi peningkatan sebesar 2,05 persen pada tahun ajaran 2019/2020 sehingga jumlahnya menjadi 104 ribu orang.

Tabel 3.8 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2019/2020


Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	48 676	614 503	1 : 13
SMP/MTs	31 445	287 181	1 : 9
SMA/MA	17 503	169 556	1 : 10
SMK	6 832	80 032	1 : 12

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021

Rasio guru-murid dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah peserta didik (murid) dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-murid yang terlalu tinggi akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses pengajaran tidak efisien, karena guru mengajar sedikit siswa. Rasio guru-murid dapat bervariasi dan bergantung pada banyak faktor.

Pada tabel 3.8 terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan, rasio guru-murid sudah berada di atas standar ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah murid terhadap guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya adalah 20 orang. Sedangkan pada SMK idealnya adalah satu guru bertanggung jawab terhadap 15 murid. Meskipun demikian, rasio guru-murid bukan merupakan faktor mutlak dalam keberhasilan proses belajar anak. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

<https://intb.bps.go.id>



CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

<https://ntb.scribd.com>

<https://ntb.bps.go.id>

CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Dengan kebijakan ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan dengan: (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan; (2) hasil pembelajaran berkualitas; dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi (Kemendikbud, 2020).

Dalam bab ini, indikator terkait pembangunan pendidikan yang akan dibahas antara lain: angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS) dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 4.1. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi NTB, 2020

	Usia		
	15-24	15-59	15+
Total	99,93	92,48	87,60
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,92	94,65	91,19
Perempuan	99,93	90,50	84,34
Tipe Daerah			
Perkotaan	99,93	94,64	90,07
Perdesaan	99,92	90,40	85,25
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	100,00	90,94	84,05
Kuintil 2	100,00	90,88	84,53
Kuintil 3	99,81	91,80	86,82
Kuintil 4	99,84	92,39	88,18
Kuintil 5	100,00	95,73	93,29

Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada ketiga kelompok umur terdapat pola yang sama untuk penduduk kelompok umur 15-59 tahun dan 15 tahun ke atas. Kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, penduduk berjenis kelamin perempuan, atau penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi terbawah. Adapun untuk kelompok umur 15-24 tahun, AMH untuk setiap karakteristik penduduk relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan AMH di kelompok umur tersebut tidak begitu terlihat.

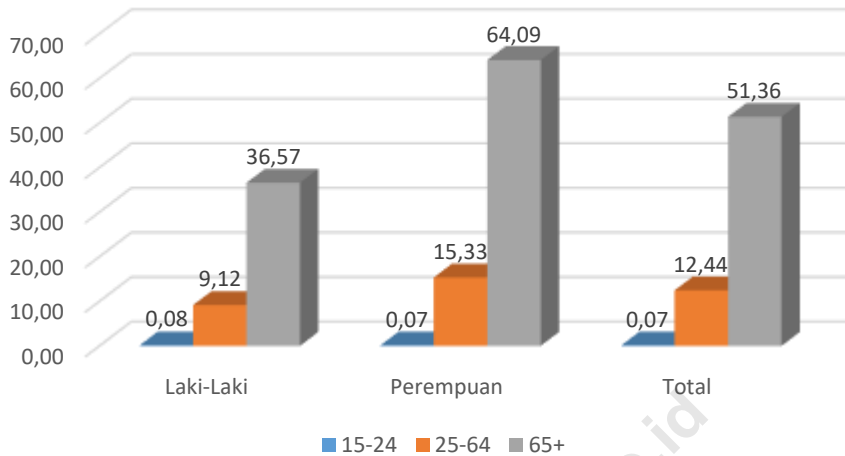
Mengingat bahwa prinsip utama SDGs adalah “no one left behind”, maka kemampuan literasi ketiga kelompok penduduk tersebut perlu menjadi fokus pemerintah. Kemampuan literasi penduduk yang meningkat akan memberikan *multiplier effect* dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya

berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain (UNESCO, 2013).

Khusus penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas, tingkat literasi perempuan (84,34 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (91,19 persen). AMH di daerah perkotaan sebesar 90,07 persen sedangkan di perdesaan 85,25 persen. Dari kemampuan ekonomi rumah tangga, AHM kelompok ekonomi menengah dan tinggi lebih tinggi dibanding AHM golongan ekonomi rendah. Untuk mencapai target RPJMD, perlu digalakkan program keaksaraan terutama kepada wanita, masyarakat perdesaan, dan masyarakat golongan ekonomi rendah.

Angka melek huruf untuk kelompok remaja (15-24 tahun) hampir mencapai 100 persen, artinya hampir seluruh remaja mempunyai kemampuan literasi. Tidak ada perbedaan signifikan untuk gender, tipe wilayah dan kelompok pengeluaran rumah tangga untuk kategori usia 15-24 tahun. Dengan tingginya angka melek huruf di kategori remaja, diharapkan remaja mampu menerima dan memahami informasi yang diterima dengan lebih baik. Diharapkan beberapa tahun ke depan, AMH di Indonesia akan semakin tinggi, sehingga dengan kemampuan literasi yang baik, akan mampu memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Gambar 4.1 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di NTB tahun 2020. Secara total (laki-laki dan perempuan), sebesar 51,36 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk kelompok usia dewasa (25-64 tahun) terdapat 12,44 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok umur remaja hanya sebesar 0,07 persen saja yang buta aksara.

Dilihat dari sisi gender, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk kategori dewasa dan lansia. Meski sudah dilakukan program pengentasan, tetapi buta huruf perempuan masih tetap tinggi. Ini kemungkinan disebabkan karena kebanyakan mereka yang menjadi sasaran program pengentasan buta huruf disibukkan oleh pekerjaan atau urusan rumah tangga sehingga tidak optimal dalam mengikuti program tersebut. Jika dilihat lebih rinci pada kelompok umur remaja, selisih angka buta huruf perempuan dengan laki-laki hampir tidak terlihat. Menurunnya perbedaan gender dan kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya

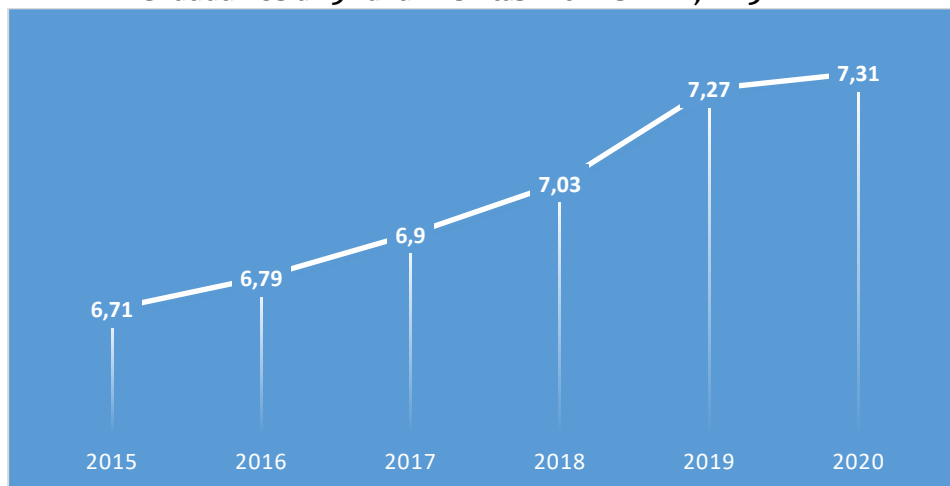
tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan dan semakin menipisnya kesenjangan gender di masyarakat.

4.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 4.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (dalam Tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Provinsi NTB, 2015 – 2020



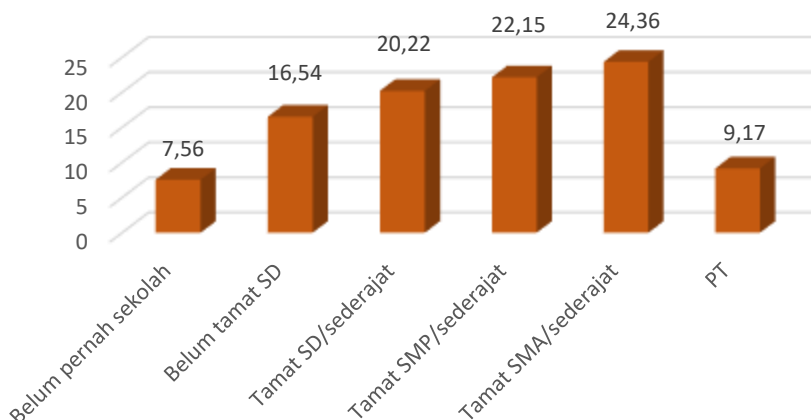
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa RLS penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2020 di NTB mencapai 7,31 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII). RLS cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga 2020. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan angka RLS di tahun 2019-2020 relatif lebih rendah yaitu sebesar 0,04 poin.

4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, suatu negara akan dapat menghadapi tantangan perubahan zaman. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB, Maret 2020



Sumber: Susenas Maret 2020, diolah

Gambaran kualitas SDM di Provinsi NTB dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas disajikan pada Gambar 4.3. Penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 24,36 persen menamatkan SMA/ sederajat, 22,15 persen lulusan SMP/ sederajat, 20,22 persen tamatan SD/ sederajat, dan hanya 9,17 persen yang lulus dari perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3). Namun masih ada 24,10 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat. Tingginya masyarakat yang tidak mempunyai ijazah dapat disebabkan karena penduduk tua dan dewasa tidak mendapatkan akses yang baik untuk pendidikan di masa lalu.

<https://ntb.bps.go.id>

<https://ntb.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://ntb.go.id>

<https://ntb.bps.go.id>

Tabel 1.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	99,61	99,69	99,75
Lombok Tengah	99,64	99,47	99,42
Lombok Timur	99,23	99,29	99,27
Sumbawa	98,72	99,04	99,20
Dompu	100,00	100,00	99,71
Bima	99,98	99,49	99,95
Sumbawa Barat	100,00	100,00	99,58
Lombok Utara	98,61	98,87	99,75
Kota Mataram	99,06	99,66	99,72
Kota Bima	100,00	99,61	99,21
Nusa Tenggara Barat	99,43	99,46	99,52

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	96,18	96,49	97,90
Lombok Tengah	97,49	97,65	98,88
Lombok Timur	98,23	98,49	99,08
Sumbawa	95,76	96,25	95,12
Dompu	98,86	99,17	99,73
Bima	99,09	99,06	99,05
Sumbawa Barat	95,16	95,15	94,84
Lombok Utara	98,21	97,08	96,96
Kota Mataram	98,00	98,94	98,07
Kota Bima	98,73	99,18	99,01
Nusa Tenggara Barat	97,72	97,92	98,32

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	80,02	80,28	80,57
Lombok Tengah	70,03	71,04	71,70
Lombok Timur	73,68	73,81	74,18
Sumbawa	78,11	78,32	78,69
Dompu	75,17	75,78	75,83
Bima	81,00	81,87	81,57
Sumbawa Barat	78,07	78,57	79,19
Lombok Utara	75,16	73,23	73,42
Kota Mataram	86,06	87,53	87,32
Kota Bima	86,36	87,07	87,23
Nusa Tenggara Barat	76,89	77,51	77,64

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 4.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	109,35	106,00	104,40
Lombok Tengah	106,19	108,75	107,59
Lombok Timur	109,98	107,00	105,68
Sumbawa	104,32	105,88	104,02
Dompu	116,49	118,34	116,74
Bima	116,64	115,62	113,80
Sumbawa Barat	107,38	103,91	103,16
Lombok Utara	104,59	114,14	112,40
Kota Mataram	101,79	102,38	100,57
Kota Bima	114,03	109,42	108,14
Nusa Tenggara Barat	108,82	108,50	107,02

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	97,43	98,15	100,47
Lombok Tengah	89,77	84,08	87,51
Lombok Timur	88,99	89,42	90,22
Sumbawa	101,40	99,32	97,72
Dompu	92,26	89,99	90,22
Bima	91,67	92,69	93,71
Sumbawa Barat	89,44	88,04	89,50
Lombok Utara	98,84	95,96	93,96
Kota Mataram	100,62	98,76	100,83
Kota Bima	108,64	100,82	100,29
Nusa Tenggara Barat	93,83	92,07	93,59

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 6.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	89,45	88,38	89,51
Lombok Tengah	88,80	91,72	91,96
Lombok Timur	87,83	89,62	89,56
Sumbawa	80,12	81,69	89,55
Dompu	105,46	107,05	105,37
Bima	98,43	96,05	97,64
Sumbawa Barat	80,94	93,46	95,08
Lombok Utara	78,48	63,88	67,18
Kota Mataram	92,80	99,73	97,41
Kota Bima	91,41	95,25	96,34
Nusa Tenggara Barat	89,64	90,86	91,77

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 7.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	99,61	99,03	99,01
Lombok Tengah	98,11	98,61	98,42
Lombok Timur	97,97	98,29	98,11
Sumbawa	98,72	98,90	98,90
Dompu	100,00	99,31	99,57
Bima	99,98	99,20	99,19
Sumbawa Barat	100,00	99,81	99,49
Lombok Utara	98,61	98,69	98,76
Kota Mataram	99,06	99,65	99,50
Kota Bima	100,00	99,38	99,21
Nusa Tenggara Barat	98,86	98,87	98,78

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 8.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	83,98	83,79	84,68
Lombok Tengah	77,54	77,42	81,18
Lombok Timur	80,17	81,50	81,78
Sumbawa	82,22	82,88	82,73
Dompu	84,73	83,62	84,36
Bima	89,21	89,02	88,96
Sumbawa Barat	85,87	85,19	85,18
Lombok Utara	79,37	79,31	80,01
Kota Mataram	96,87	96,43	96,55
Kota Bima	96,96	96,91	96,81
Nusa Tenggara Barat	83,88	83,92	84,98

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 9.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	62,62	63,27	63,17
Lombok Tengah	61,93	61,24	61,57
Lombok Timur	64,08	64,37	67,28
Sumbawa	55,98	56,94	57,81
Dompu	69,60	70,04	70,63
Bima	78,12	77,73	77,38
Sumbawa Barat	74,57	75,10	75,04
Lombok Utara	52,95	53,69	54,30
Kota Mataram	74,00	74,35	74,11
Kota Bima	79,29	79,75	79,34
Nusa Tenggara Barat	65,77	66,04	66,81

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 10.
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	10,16	17,06	13,75
Lombok Tengah	12,76	22,91	18,25
Lombok Timur	9,22	16,51	13,24
Sumbawa	5,48	9,52	7,46
Dompu	7,10	12,23	9,66
Bima	8,61	14,17	11,44
Sumbawa Barat	4,23	8,54	6,37
Lombok Utara	11,85	19,28	15,66
Kota Mataram	4,47	8,84	6,70
Kota Bima	5,84	7,19	6,54
Nusa Tenggara Barat	8,81	15,66	12,40

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 11.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	89,84	82,94	86,25
Lombok Tengah	87,24	77,09	81,75
Lombok Timur	90,78	83,49	86,76
Sumbawa	94,52	90,48	92,54
Dompu	92,90	87,77	90,34
Bima	91,39	85,83	88,56
Sumbawa Barat	95,77	91,46	93,63
Lombok Utara	88,15	80,72	84,34
Kota Mataram	95,53	91,16	93,30
Kota Bima	94,16	92,81	93,46
Nusa Tenggara Barat	91,19	84,34	87,60

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 12.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	6,16	6,37	6,41
Lombok Tengah	5,96	6,27	6,28
Lombok Timur	6,45	6,69	6,70
Sumbawa	7,72	7,91	7,92
Dompu	8,12	8,40	8,44
Bima	7,59	7,77	7,78
Sumbawa Barat	8,24	8,53	8,53
Lombok Utara	5,81	5,84	5,91
Kota Mataram	9,43	9,45	9,46
Kota Bima	10,30	10,38	10,49
Nusa Tenggara Barat	7,03	7,27	7,31

Sumber: Susenas Maret 2018-2020

Tabel 13. Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs /Paket B	SMA/ SMK/MA/ Paket C	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,18	32,46	17,91	17,26	5,68	26,52	100,00
LOMBOK TENGAH	0,58	39,64	13,80	16,80	2,76	26,43	100,00
LOMBOK TIMUR	0,39	40,63	13,77	14,53	6,60	24,09	100,00
SUMBAWA	0,28	35,40	18,45	12,74	4,24	28,89	100,00
DOMPU	0,00	38,89	18,29	16,87	1,34	24,61	100,00
BIMA	0,00	37,71	18,85	14,07	3,87	25,50	100,00
SUMBAWA BARAT	0,31	38,46	13,20	12,20	4,97	30,87	100,00
LOMBOK UTARA	0,55	36,50	15,87	10,88	6,40	29,80	100,00
MATARAM	0,16	30,13	13,96	13,22	16,80	25,74	100,00
BIMA	0,00	27,66	19,75	14,70	8,52	29,38	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,29	36,63	15,84	14,88	6,14	26,22	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 14. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs /Paket B	SMA/ SMK/MA/ Paket C	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,00	38,24	14,06	12,16	5,37	30,18	100,00
LOMBOK TENGAH	0,80	34,32	14,52	13,10	6,52	30,73	100,00
LOMBOK TIMUR	0,56	33,26	16,16	15,05	6,12	28,84	100,00
SUMBAWA	0,69	44,96	14,46	12,95	5,66	21,28	100,00
DOMPU	0,24	43,24	16,97	14,40	2,40	22,75	100,00
BIMA	0,00	37,71	21,29	16,36	3,04	21,60	100,00
SUMBAWA BARAT	0,00	41,16	11,89	14,12	5,69	27,13	100,00
LOMBOK UTARA	0,61	37,04	15,28	11,42	3,92	31,74	100,00
MATARAM	0,18	30,74	11,00	16,24	18,15	23,67	100,00
BIMA	0,47	32,28	14,88	15,56	10,47	26,34	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,41	36,10	15,25	14,18	6,85	27,21	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 15. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/ SMK/MA/ Paket C	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,09	35,33	15,99	14,73	5,52	28,34	100,00
LOMBOK TENGAH	0,69	36,98	14,16	14,95	4,64	28,58	100,00
LOMBOK TIMUR	0,48	36,90	14,98	14,79	6,36	26,49	100,00
SUMBAWA	0,47	39,83	16,60	12,84	4,90	25,36	100,00
DOMPU	0,12	40,95	17,66	15,70	1,85	23,73	100,00
BIMA	0,00	37,71	20,01	15,15	3,48	23,65	100,00
SUMBAWA BARAT	0,17	39,70	12,60	13,08	5,30	29,15	100,00
LOMBOK UTARA	0,58	36,77	15,58	11,14	5,18	30,75	100,00
MATARAM	0,17	30,42	12,55	14,65	17,44	24,76	100,00
BIMA	0,24	30,01	17,27	15,13	9,51	27,83	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,35	36,37	15,55	14,54	6,49	26,70	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 16. Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	SMK/MAK	Diploma 1/2	Diploma 3	Diploma 4/S1, S2, S3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
LOMBOK BARAT	20,40	23,52	19,86	23,26	4,68	0,05	1,04	7,19	100,00
LOMBOK TENGAH	19,29	26,05	20,72	22,53	2,59	0,62	1,35	6,85	100,00
LOMBOK TIMUR	16,56	30,15	18,08	22,80	3,05	0,46	0,82	8,09	100,00
SUMBAWA	11,39	31,31	21,03	23,36	3,90	0,41	0,81	7,80	100,00
DOMPU	16,53	17,01	22,23	31,46	1,91	0,61	0,93	9,30	100,00
BIMA	18,35	19,89	17,78	30,86	2,22	0,17	0,22	10,51	100,00
SUMBAWA BARAT	11,75	26,46	14,52	28,66	6,24	0,75	1,00	10,62	100,00
LOMBOK UTARA	17,74	29,03	17,51	24,26	3,91	0,51	1,59	5,45	100,00
MATARAM	8,81	16,53	18,68	31,06	7,71	0,08	2,24	14,89	100,00
BIMA	7,41	12,07	17,13	39,26	7,40	0,21	1,81	14,72	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	16,03	24,73	19,17	25,76	3,92	0,37	1,12	8,91	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 17. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/MA/SMLB/ Paket C	SMK/MAK	Diploma 1/2	Diploma 3	Diploma 4/ S1, S2, S3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
LOMBOK BARAT	24,00	31,65	21,59	14,94	1,83	0,33	1,17	4,51	100,00
LOMBOK TENGAH	19,02	32,69	28,48	13,77	1,62	0,00	0,40	4,02	100,00
LOMBOK TIMUR	14,47	35,30	28,90	13,50	1,12	0,24	1,08	5,39	100,00
SUMBAWA	15,22	35,38	21,80	17,01	2,21	0,65	1,32	6,40	100,00
DOMPU	19,50	20,62	23,03	25,41	1,23	1,02	1,26	7,94	100,00
BIMA	19,93	23,50	29,44	17,26	0,95	0,42	1,35	7,14	100,00
SUMBAWA BARAT	16,13	28,21	17,15	23,01	2,57	0,90	1,43	10,60	100,00
LOMBOK UTARA	13,14	43,07	19,41	17,08	1,35	0,36	1,23	4,35	100,00
MATARAM	12,02	20,18	18,71	30,32	3,21	0,74	2,77	12,05	100,00
BIMA	9,73	14,42	17,00	32,83	7,89	1,38	2,49	14,27	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	17,02	30,51	24,86	17,65	1,88	0,40	1,24	6,42	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 18. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	SMK/MAK	Diploma 1/2	Diploma 3	Diploma 4/S1, S2, S3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
LOMBOK BARAT	22,27	27,74	20,76	18,94	3,20	0,20	1,11	5,80	100,00
LOMBOK TENGAH	19,14	29,65	24,92	17,79	2,06	0,29	0,84	5,32	100,00
LOMBOK TIMUR	15,41	32,99	24,05	17,67	1,98	0,34	0,96	6,60	100,00
SUMBAWA	13,26	33,30	21,41	20,25	3,07	0,53	1,06	7,11	100,00
DOMPU	18,01	18,81	22,63	28,43	1,57	0,82	1,10	8,62	100,00
BIMA	19,15	21,73	23,72	23,94	1,57	0,30	0,80	8,80	100,00
SUMBAWA BARAT	13,92	27,33	15,83	25,85	4,42	0,83	1,21	10,61	100,00
LOMBOK UTARA	15,38	36,23	18,48	20,58	2,60	0,43	1,41	4,89	100,00
MATARAM	10,44	18,39	18,69	30,68	5,41	0,42	2,51	13,44	100,00
BIMA	8,60	13,28	17,06	35,96	7,65	0,81	2,16	14,49	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	16,55	27,76	22,15	21,51	2,85	0,39	1,18	7,60	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 19. Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah, 2020

Kabupaten/Kota	Masih mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019)	Pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2018/2019)	Pernah mengikuti prasekolah sebelum tahun ajaran 2018/2019	Tidak/ belum pernah mengikuti prasekolah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LOMBOK BARAT	24,40	0,70	3,95	70,95	100,00
LOMBOK TENGAH	20,44	0,75	4,38	74,44	100,00
LOMBOK TIMUR	23,67	0,19	3,96	72,19	100,00
SUMBAWA	24,25	1,13	4,98	69,64	100,00
DOMPU	18,41	1,16	8,33	72,10	100,00
BIMA	25,93	1,16	8,14	64,77	100,00
SUMBAWA BARAT	28,90	0,54	3,97	66,59	100,00
LOMBOK UTARA	14,58	1,21	5,82	78,38	100,00
MATARAM	21,84	0,00	2,94	75,22	100,00
BIMA	25,90	0,00	7,01	67,08	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	22,84	0,63	4,87	71,66	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 20. Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah, 2020

Kabupaten/Kota	Taman Kanak-kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD terintegrasi, BKB/Taman Posyandu, PAUD-AAM, PAUD-PAK	Kelompok bermain	Taman Penitipan Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LOMBOK BARAT	63,39	12,11	23,59	0,91	0,00	100,00
LOMBOK TENGAH	67,47	9,16	23,37	0,00	0,00	100,00
LOMBOK TIMUR	79,36	5,73	14,02	0,00	0,89	100,00
SUMBAWA	72,42	2,37	25,21	0,00	0,00	100,00
DOMPU	55,39	0,00	44,61	0,00	0,00	100,00
BIMA	64,42	0,84	34,23	0,51	0,00	100,00
SUMBAWA BARAT	88,93	0,00	11,07	0,00	0,00	100,00
LOMBOK UTARA	59,52	6,89	33,60	0,00	0,00	100,00
MATARAM	74,12	15,53	8,48	0,00	1,87	100,00
BIMA	81,44	5,16	12,19	1,22	0,00	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	70,87	6,47	22,08	0,23	0,35	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

<https://ntb.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jalan Gunung Rinjani No.2, Mataram 83125
Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801
Homepage: <http://ntb.bps.go.id> Email: ntb@bps.go.id

ISSN 2797-1147



9 772797 114000